

POLICY BRIEF

Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area
(Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan
Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province
KLHK-UNDP-GEF Project

“Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan”

Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat



Ringkasan

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas 10.759.00, memiliki 6 kecamatan dan 94 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 272.531, terdiri dari laki-laki 141.564 dan perempuan sebanyak 130.967 (BPS,2022)

Kabupaten Kotawaringin Barat mayoritas merupakan bagian dari system masyarakat yang sejak dulu berhubungan dengan sungai. Daerah ini dapat dikatakan adalah sangat religious yang dicirikan oleh perkembangan dan pertumbuhan kehidupan beragama yang cukup pesat. Ditandai oleh bangunann masjid dan gereja yang indah sebagai hasil dari partisipasi masyarakat dalam membangun sarana ibadahnya. Mereka dapat hidup tentram dan saling menghargai dengan agama yang berbeda. Masuknya warga transmigrasi dari pulau jawa, menyemarakkan kehidupan masyarakat sebagai daerah lumbung padi. Terjadi akulturasi budaya dengan pendatang. Sebagian besar penduduknya adalah Suku Dayak. Diantaranya: Dayak Ngaju (Dominan), Dayak Bakumpai, Dayak Manyaan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Bawo.Seperti sebagian besar suku-suku di Indonesia, Suku Dayak memiliki upacara adat yang dikenal dengan Wadian dan Upacara Kematian Kaharingan. Selain penduduk asli, didaerah ini juga di huni oleh suku keturunan lain seperti Melayu, Cina, Madura, Batak dan Jawa.

Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu lokasi sasaran proyek Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro yang didukung oleh Kalimantan Forest UNDP Project. Desa ini memiliki luas menurut penggunaannya seluas 2.595,50 Ha. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan 8 km menggunakan sepeda motor 25 menit, ke ibukota kabupaten 40 km dengan menggunakan sepeda motor 45 menit. Jumlah kepala keluarga 931 KK dengan rincian : Laki-Laki berjumlah 1.402 jiwa, Perempuan berjumlah 1.251 jiwa. Jumlah keseluruhan 2653 jiwa. Masyarakat Desa Lada Mandala Jaya adalah masyarakat transmigrasi dari pulau Jawa. Transmigran umumnya sudah mendapatkan lahan usaha sebanyak 2 skema, pertama seluas 7.500 m2 dan lahan usaha kedua 1 Ha serta lahan pekarangan 2.500 m2. Lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat transmigrasi ditanami kelapa sawit. Pendapatan masyarakatnya selain dari perkebunan kelapa sawit juga dari pertanian.

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat tergantung dari pembangunan manusianya. Salah satu alat ukurnya adalah tingkat indeks pemberdayaan gender. Provinsi Kalimantan Tengah menduduki rangking pertama secara nasional dinilai dari indeks pemberdayaan gender (IDG). Walaupun secara total nilai IDG Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 82,41%, namun Kabupaten Kotawaringin Barat masih menduduki peringkat ke 13 dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, terendah setelah Kabupaten Seruyan, yaitu 64,54%. Pembangunan manusia dalam hal ini indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kotawaringin Barat, masih jauh dari harapan. Artinya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih rendah.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di desa sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender di dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi semakin nyata, dibutuhkan. Untuk itu, pengelolaan sumber-sumberekonomi desa mesti dibarengi pula dengan perbaikan pembangunan kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial kelompok perempuan dan anak khususnya, serta masyarakat umumnya. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat memberikan kesejahteraan dan terjadi perbaikan serta peningkatan pendapatan keluarga serta perbaikan posisi dan kondisi kepemimpinan perempuan di akar rumput, terutama didalam pengelolaan ekonomi lokal.

Dukungan dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan desa yang berada di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain), khususnya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan, program dan anggaran. Fasilitasi sebuah forum multipihak secara partisipatif untuk pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta berperspektif gender sangat penting dilakukan. Kebutuhan diatas berjalan secara paralel dengan pemberdayaan dan pendampingan terhadap proses kegiatan ekonomi yang telah berjalan sejak lama di Desa Mandala Jaya yang dimotori oleh perempuan.



Pendahuluan

Salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender dan sosial yang menyebabkan munculnya eksklusi sosial dan gender. Manfaat dari program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, mendorong pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender agar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam upaya meningkatkan pembangunan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap level pembangunan mulai dari tingkatkelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan Proyek Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan di Kalimantan (Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan) atau KalFor Project, dimana salah satu lokasi yang menjadi target adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan salah satu mitra penerima hibah proyek berjudul Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province, yang memiliki tujuan untuk menciptakan para local champion khususnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan responsive gender, inovatif, kreatif dan transformative di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif untuk keberlanjutan hidup. Melalui Proyek ini diharapkan para Local Champion atau kader-kader penggerak perubahan sosial ekonomi di tingkat kelurahan/desa aktif memimpin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, menyelamatkan dan menjaga hutan di luar Kawasan Hutan (Area Penggunaan Lain (APL) yang bernilai keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem pada suatu kesatuan lanskap dari dataran rendah ke pegunungan di Kalimantan

Tujuan

Policy Brief ini merupakan dokumen hasil analisis terhadap isu strategis dan kebijakan yang dikembangkan dari hasil temuan di lapangan melalui kegiatan kegiatan assessment, pendampingan, pelatihan, lokakarya/FGD/ diskusi-diskusi yang dilakukan ASPPUK selama menjalankan proyek. Tujuan dari pembuatan Policy Brief ini adalah:

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) kepada para stakeholder yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan/ membuat keputusan
2. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa/kelurahan dan para pemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu strategis yang ada
3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan para Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Desa Mandala Jaya



Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan di tingkat nasional yang memiliki 44 NGO anggota, berada di 20 provinsi, memiliki 77 Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro (JARPUK) yang berada di level kota/kabupaten, memiliki 1528 Kelompok Perempuan Usaha Kecil Mikro (KPUK) ditingkat desa, mendampingi kurang lebih 2 juta perempuan usaha kecil mikro dan memiliki 33 Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). ASPPUK memiliki visi terwujudnya perempuan usaha kecil mikro yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusi.

ASPPUK sebagai organisasi yang focus pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, memiliki keahlian, pengalaman dan modalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis usaha melalui pendekatan;

(1) Pengintegrasian nilai-nilai 3 P (people, planet, profit) dalam pengembangan bisnis, dimana pengembangan model bisnis yang dikembangkan tidak saja mengejar keuntungan (profit) semata namun juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Planet) dan menghormati hak asasi manusia (people), dimana bisnis yang dijalankan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja dan tidak melanggar HAM

(2) Pengintegrasian bisnis responsive gender, dimana bisnis yang dijalankan harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rantai nilai usaha, mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah perempuan dan anak, mengembangkan SOP anti kekerasan seksual ketika menjalankan bisnis, memberlakukan pembagian peran adil gender, memberdayakan kaum perempuan yang hidup disekitar area usaha atau bisnis yang dijalankan dan lain-lain

(3) Pendekatan bisnis komunitas atau bisnis berbasis sumber daya local, dimana pendekatan ini dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di komunitas. Bahan baku produk yang dikembangkan diambil dari keunggulan dan ciri khas yang ada di daerah tersebut, tidak mendatangkan bahan baku dari luar, namun memanfaatkan sumber daya local secara berkelanjutan, arif dan bijaksana.

4) Bisnis yang dikembangkan berdasarkan local genuine (pengetahuan dan keterampilan lokal berdasarkan budaya setempat, yang menjadi ciri lokal dan telah dipraktekkan sejak lama), local genius (kemampuan untuk menerima, memilah dan mengambil budaya luar yang baik dan bermanfaat) dan local innovation (kreatifitas yang timbul dengan memadukan kearifan lokal).

ASPPUK telah memberdayakan Local Champion dan masyarakat khususnya perempuan dan kaum muda di lokasi sasaran proyek melalui serangkaian kegiatan diantaranya melakukan assessment awal di setiap desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, melakukan ToT Kepemimpinan Sosial Ekonomi Perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Sosial Ekonomi di tingkat komunitas/desa, melakukan pendampingan yang terdiri dari bisnis mentoring dan coachong, diskusi rutin, pelatihan pemasaran, pelatihan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam, bantuan bibit usaha, pendampingan untuk pengurusan NIB, HAKI, PIRT dan membangun kolaborasi dengan para stake holder.



Pengembangan Bisnis/ Usaha Komunitas di Desa Mandala Jaya

Selama pendampingan (Technical Assistance), ASPPUK melakukan mentoring dan coaching bisnis dengan mengembangkan bisnis/usaha komunitas berdasarkan potensi sumberdaya lokal yang ada di desa dan memiliki nilai ekonomis serta dapat diolah menjadi mata pencaharian alternatif maupun eksisting untuk keberlanjutan livelihood masyarakat desa dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat. Produk yang dikembangkan berdasarkan mapping dan perengkingan sumberdaya atau potensi local yang ada di desa lokasi sasaran proyek.

Sumber perekonomian masyarakat Desa Mandala Jaya yang digunakan sebagai mata pencaharian utama adalah pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan dan industri rumahan. Perempuan memiliki akses dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi yang ada di desa dan mendapat dukungan dari pemerintah desa. Dalam hal pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, semua masyarakat mendapatkan hak yang sama. Kepala desa dan penyuluh lapangan pertanian memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi melalui motivasi dan membantu perkembangan pertanian masyarakat.

Jenis usaha yang dikelola perempuan adalah keripik berbahan dasar ketela, pisang, singkong, pare, usus, tempe, jamur, dan kacang. Hasil olahan biasanya dijual langsung kepada pembeli yang datang, dititip kewarung yang ada di desa dan di luar desa. Usaha perempuan yang lain sebagai tukang jahit atau border. Sedangkan, usaha yang dikelola oleh laki-laki sebagai tukang kayu, tukang batu dan tukang service elektronik. Usaha yang dijalani sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Hasilnya digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tabungan

Rencana pengembangan usaha dibidang keripik sudah terlihat sejak awal proyek. Keseriusan para pengolah keripik ditunjukkan dengan adanya merk dagang pada kemasan dan kemasan sudah dibuat menarik. Pasar penjualan sudah terbuka, pembeli dari semua kalangan, penjualan hasil olahan di pasarkan di dalam desa, desa tetangga, dititipkan di warung makan dan karyawan perusahaan sawit PT. Astra sudah menjadi langganan tetap.

Pasar yang telah dibangun saat ini sangat berpengaruh untuk kelancaran usaha. Ketersediaan bahan baku tertentu untuk keripik, kadang menjadi faktor penghambat. Tersedianya bahan tergantung musim contohnya sukun dan Jamur tangkos sawit. Permintaan keripik yang meningkat selain menambah jaringan pasar juga meningkatkan pendapatan. Pengolah biasanya langsung menetapkan harga jual yang sama, baik untuk pembeli perorangan maupun untuk reseller. Sampai saat ini jalur pasar yang diketahui hanya sampai pembeli pertama.

Usaha yang di jalankan mendapat dukungan dari keluarga. Hal ini dibuktikan dengan pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Misalnya mencari bahan olahan pisang, laki-laki akan mencari pisang di sekitar kampung dan membawanya kerumah, perempuan yang akan memproses mulai dari mengupas, menggoreng sampai mengemas. Penjualan dan pengantaran ke warung atau ke pembeli biasanya dibantu oleh anak laki-laki dan suami. Pengembangan usaha mendapat dukungan dari pemerintah desa, keluarga, tetangga dan masyarakat lainnya. Promosi biasanya dibantu oleh tetangga yang sudah tahu jenis keripik yang dijual.

Usaha Komunitas yang dikembangkan oleh penerima manfaat program memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan social ekonomi serta lingkungan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh dari usaha komunitas di Kelurahan Kotawaringin Hilir yang dibangun oleh tim Local Champion berkomitmen menyumbangkan 5% dari keuntungan yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap persoalan sampah yang ada di Desa Mandala Jaya dan berkomitmen mendukung program/kegiatan untuk membangun dan melestarikan wilayah hutan APL



Mengapa ini penting?

Masih terjadi kesenjangan gender terhadap perempuan dan anak muda yang hidup di area sekitar hutan, diantaranya minimnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa, terbatasnya akses dan control perempuan dan anak muda terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi, minimnya kapasitas dan keterampilan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis usaha, lemahnya kepemimpinan perempuan dan kaum muda dalam pengembangan bisnis usaha, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sehingga perempuan dan anak muda tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, masih adanya hambatan-hambatan social budaya yang menyulitkan perempuan maupun anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di tingkat desa.

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Kesenjangan Gender akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, memperburuk ketimpangan pembangunan, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan menghambat pencapaian tujuan SDGs, yaitu tujuan ke 1; Mengakhiri kemiskinan, tujuan ke 5; Mencapai kesejateraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan tujuan ke 8; Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

Perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Prinsip SDGs “no one left behind” menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dalam pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB . Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Cita pemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.



Isu-Isu Gender dan Kepemimpinan Perempuan untuk mendukung Pencapaian SDGs

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan penduduk Desa Lada Mandala Jaya rata-rata hanya sampai sekolah dasar, tidak lulus sekolah dasar, tidak lulus sekolah lanjutan pertama dan lulus sekolah lanjutan tingkat pertama. Jauhnya jarak antara desa dan sekolah serta sarana transportasi yang sulit dengan kondisi jalan yang rusak parah di tahun 1983, saat Desa ini masih dalam persiapan dan pembinaan sebagai daerah transmigrasi, menyebabkan banyak penduduk desa saat itu, enggan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Saat ini, jumlah anak putus sekolah juga cukup besar, dimana laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan 20 orang. Dari wawancara yang dilakukan, alasan putus sekolah belum diketahui dengan pasti. Diduga, karena faktor ekonomi, larangan orangtua yang menganggap pendidikan tidak penting, karena sakit yang diderita atau karena anak yang tidak mau sekolah. Walaupun lembaga non formal tidak tersedia di desa, namun anak yang putus sekolah bisa mengikuti paket A,B. Mereka ditumpangkan pada desa tetangga terdekat.

Belum tercipta pembagian kerja adil gender di dalam rumah tangga

Pembagian peran dalam rumah tangga seperti mengurus anak, memasak, mengambil air, mengantar anak sekolah, masih menjadi tugas utama perempuan sebagai ibu dan istri. Laki-laki atau kepala keluarga mempunyai peran mencari nafkah, sedangkan istri mengurus pendidikan anak dan rumah tangga. Meskipun sebagian perempuan juga mencari nafkah dan menghasilkan pendapatan dari hasil usaha/bisnis yang dijalankan, namun ketika pulang ke rumah, istri dianggap wajib melakukan semua peran domestik. Masyarakat desa beranggapan bahwa pembagian peran telah adil karena sudah berlaku otomatis sejak jaman dahulu kala. Belum ada aturan dan kebijakan lokal dari pemerintah desa terkait keadilan dan kesetaraan gender. Anak perempuan didik mengikuti pola ibu dan begitu pula anak laki-laki, mengikuti bapaknya. Anak perempuan membantu ibu dalam urusan domestik dan usaha, anak laki-laki membantu bapak ke kebun.

Lemahnya akses Kelompok Wanita Tani (KWT) terhadap pengelolaan dana desa

Kelompok wanita tani (KWT) tidak mendapat akses untuk mengelola dana desa, kelompok wanita tani, namun disisi lain KWT mendapatkan bantuan dari dinas pertanian. Kepala desa, PKK, karang taruna dan lembaga lain yang ada di desa mendukung usaha yang dikelola oleh perempuan. Rencana pengembangan usaha pariwisata yang sedang dirintis mendapat dukungan yang sangat serius dari pemerintahan desa. Keterbatasan sumberdaya manusia menjadi tantangan untuk membangun kemitraan dengan pihak lain.

Terbatasnya Keterampilan digital Perempuan untuk mengembangkan bisnis usaha

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap masyarakat desa terutama perempuan. Telepon seluler yang semakin canggih menyediakan berbagai macam aplikasi dan menu untuk mempromosikan usaha. Sayangnya, di desa Mandala Jaya masih sedikit bahkan jarang sekali, perempuan pelaku usaha memanfaatkan telepon seluler sebagai sarana promosi dan penjualan. Tantangan besar yang sering dihadapi perempuan adalah pengetahuan yang masih terbatas untuk menggunakan media social dan membuat konten kreatif untuk mempromosikan produk

Packaging/ kemasan produk usaha belum didesain dengan menarik

Desain kemasan merupakan suatu nilai tambah yang dapat dijadikan sebagai perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menjaring konsumen. Dalam konteks komunikasi visual, desain sudah menjadi bagian dari tim dalam industri komunikasi. Desain juga sudah menjadi salah satu aspek yang berpengaruh dalam membentuk perilaku suatu masyarakat dan perkembangan ekonominya. Sayangnya, di desa Lada Mandala Jaya masih sedikit bahkan jarang sekali, perempuan pelaku usaha memiliki desain kemasan yang menarik yang dapat membantu branding usaha komunitasnya. Tantangan besar yang sering dihadapi perempuan adalah pengetahuan yang masih terbatas untuk memanfaatkan digital teknologi dalam membuat desain kemasan yang menarik.



Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Desa Mandala Jaya diantaranya;

- Meningkatkan kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan banyaknya anak yang putus sekolah melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya pendidikan, membuka akses transportasi yang memadai, menyediakan infrastruktur pendidikan yang dekat dengan desa, membuka akses dan kesempatan bagi anak untuk mengikuti Kejar Paket A dan B
- Melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam rumahtangga dan dalam menjalankan bisnis usaha
- Mengalokasikan program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung kegiatan Kelompok Wanita Tani
- Mengintegrasikan isu GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan inklusivitas) ke dalam program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung Pembangunan Desa utamanya di wilayah-wilayah APL, diantaranya dalam membuat Grand Design program-program pemerintah ataupun swasta lainnya agar lebih memperhatikan nilai-nilai Gender, Disabilitas dan Inklusi
- Memberi ruang kepada seluruh element masyarakat baik Pemangku kepentingan, Perempuan, Anak Muda, Disabilitas dalam pembangunan / pengembangan sebuah Kawasan
- Mengalokasikan anggaran, kegiatan dan program bagi pemberdayaan ekonomi dan penguatan Kepemimpinan Local Champion sebagai agen perubahan Pembangunan sosial-ekonomi yang berperspektif gender dan berkelanjutan di wilayah APL
- Mendorong kemajuan Usaha Komunitas yang telah di rintis oleh Local Champion
- Memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan digital bagi perempuan pelaku usaha
- Mendorong pemerintah desa untuk memfasilitasi pengembangan desain packaging atau kemasan produk yang menarik melalui kerjasama dengan pihak dinas perindustrian dan perdagangan maupun sektor swasta

